

BAB I

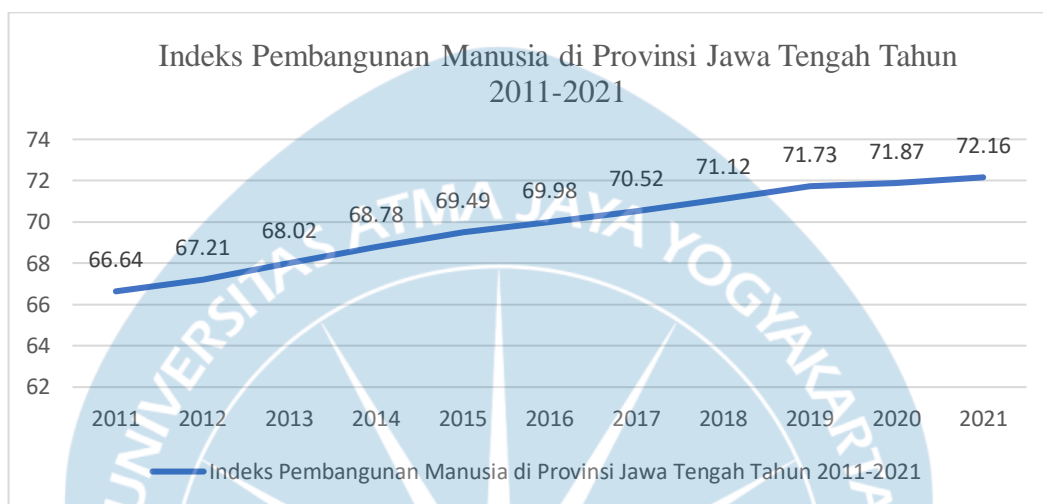
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia yang telah dilaksanakan dari masa ke masa telah memberikan banyak kemajuan pada berbagai bidang kehidupan bangsa. Meskipun secara keseluruhan hasil-hasil pembangunan belum dapat dinikmati secara merata oleh segenap masyarakat Indonesia di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun setidaknya pembangunan telah memberikan dampak positif bagi perubahan taraf hidup, kesejahteraan, dan kecerdasan bangsa. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau negara adalah menggunakan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan informasi bagaimana penduduk suatu negara dapat mengakses secara langsung hasil-hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga mendapatkan kehidupan yang layak.

Menurut Yuliani & Saragih (2014) IPM diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai sebagai cerminan kemampuan dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Oleh karena itu pembangunan dinyatakan berhasil apabila masyarakat disuatu negara atau wilayah itu kesehatannya terjamin, pendidikan nya terpenuhi dan kehidupannya sejahtera.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, nilai indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah pada 2011-2021 cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022). Data diolah

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2011-2021

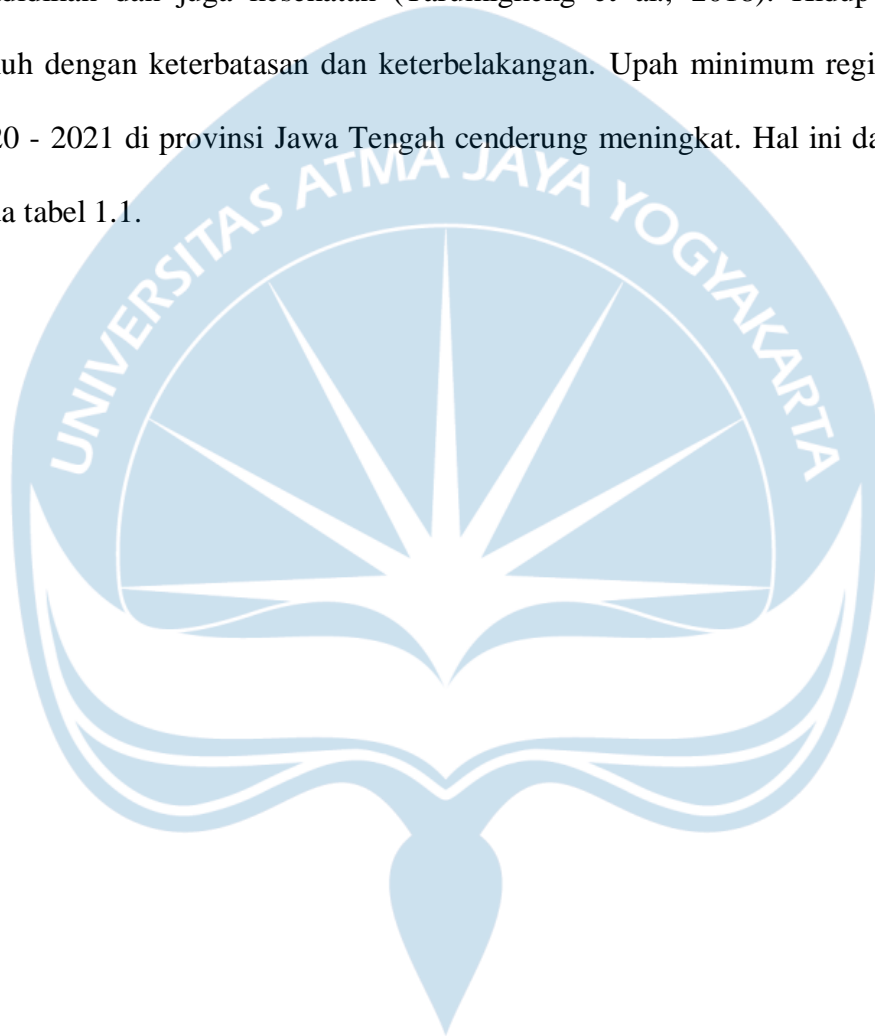
Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat diketahui bahwa indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 mengalami peningkatan 0.57 poin dari tahun sebelumnya, tahun 2013 mengalami peningkatan 0.81 poin dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 mengalami peningkatan 0.76 dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 mengalami peningkatan 0.71 poin dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 mengalami peningkatan 0.49 poin dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 mengalami peningkatan 0.54 poin dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 mengalami peningkatan 0.60 poin dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0.61 poin dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 mengalami peningkatan 0.14 poin dan pada tahun

2021 mengalami peningkatan 0.29 poin. Secara akumulatif sejak tahun 2011 hingga tahun 2021 indeks pembangunan manusia provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 5,52 poin, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,55 poin setiap tahun. Nilai-nilai peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan di berbagai sektor yang telah dilaksanakan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2011-2021 cukup baik, karena nilai indeks pembangunan manusia yang dicapai berada pada peringkat atau level menengah atas dengan variasi rentang nilai IPM antara 66,64 – 72.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sari & Yusniar (2019) menyatakan bahwa upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berarti bahwa kenaikan upah minimum regional akan menaikkan indeks pembangunan manusia. Upah merupakan bentuk balas jasa yang diterima pekerja karena telah memberikan jasanya untuk memproduksi barang atau jasa di perusahaan. Dalam sistem pengupahan dikenal sebagai upah minimum yaitu standar minimum yang dipakai pelaku industri atau pengusaha untuk memberikan upah terhadap pekerja. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional (Bambang, 2013).

Sasaran dari kebijakan mengenai upah minimum ini bertujuan untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja beserta keluarganya. Untuk mengukur bahwa setiap keluarga dapat hidup secara layak atau tidak maka dapat dilihat dari upah yang diperoleh pekerja (Noviani, 2013). Seorang pekerja yang memiliki

pendapatan tinggi maka kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidupnya juga akan tinggi. Dan seseorang yang memiliki pendapatan rendah maka akan sangat sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan (Tarumigkeng et al., 2018). Hidup seseorang penuh dengan keterbatasan dan keterbelakangan. Upah minimum regional tahun 2020 - 2021 di provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.



Tabel 1.1
Upah Minimum Regional Provinsi Jawa Tengah, 2020 – 2021 (Rp/bulan)

Kabupaten/kota	Upah Minimum Regional	
	2020	2021
Kabupaten Cilacap	2.158.327	2.228.904
Kabupaten Banyumas	1.900.000	1.970.000
Kabupaten Purbalingga	1.940.800	1.988.000
Kabupaten Banjarnegara	1.748.000	1.805.000
Kabupaten Kebumen	1.835.000	1.895.000
Kabupaten Purworejo	1.845.000	1.905.400
Kabupaten Wonosobo	1.859.000	1.920.000
Kabupaten Magelang	2.042.200	2.075.000
Kabupaten Boyolali	1.942.500	2.000.000
Kabupaten Klaten	1.947.821	2.011.515
Kabupaten Sukoharjo	1.938.000	1.986.450
Kabupaten Wonogiri	1.797.000	1.827.000
Kabupaten Karanganyar	1.989.000	2.054.040
Kabupaten Sragen	1.815.914	1.829.500
Kabupaten Grobogan	1.830.000	1.890.000
Kabupaten Blora	1.834.000	1.894.000
Kabupaten Rembang	1.802.000	1.861.000
Kabupaten Pati	1.891.000	1.953.000
Kabupaten Kudus	2.218.451	2.290.995
Kabupaten Jepara	2.040.000	2.107.000
Kabupaten Demak	2.432.000	2.511.526
Kabupaten Semarang	2.229.880	2.302.798
Kabupaten Temanggung	1.825.200	1.885.000
Kabupaten Kendal	2.061.700	2.335.735
Kabupaten Batang	2.061.700	2.129.117
Kabupaten Pekalongan	2.018.161	2.084.155
Kabupaten Pemasaran	1.865.000	1.926.000
Kabupaten Tegal	1.896.000	1.958.000
Kabupaten Brebes	1.807.614	1.866.723
Kota Magelang	1.853.000	1.914.000
Kota Surakarta	1.956.200	2.013.810
Kota Salatiga	2.034.915	2.101.457
Kota Semarang	2.715.000	2.810.025
Kota Pekalongan	2.072.000	2.139.754
Kota Tegal	1.925.000	1.982.750

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 periode tahun 2020 - 2021 UMR di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Kota Kendal yang mengalami kenaikan upah minimum paling besar yaitu dari 2.061.700 menjadi 2.335.735, yang berarti mengalami penambahan senilai 274.035. Akan tetapi, kenaikan yang terjadi terbilang masih kecil. Bercermin dari kecilnya kenaikan upah ini perlu peningkatan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di Provinsi Jawa Tengah guna menjamin kesejahteraan hidup seluruh masyarakat di Jawa Tengah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB). Kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat yang diikuti dengan indeks pembangunan manusia yang meningkat dapat tercapai ketika pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan pada kegiatan perekonomian yang membuat barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat bertambah sehingga pertambahan tersebut akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan modal manusianya tidak dapat bertahan lama dikarenakan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang begitu penting didalam strategi kebijakan pembangunan ekonomi (Amalia & Purbadharmaja, 2015).

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka produktivitas ekonomi juga akan meningkat. Dengan

begitu adanya peningkatan produktivitas ekonomi ini akhirnya akan turut meningkatkan pembangunan manusia.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan produk domestik regional bruto di provinsi Jawa Tengah 2020-2021 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah, 2020 – 2021 (%)

Kabupaten/kota	Pertumbuhan PDRB	
	2020	2021
Kabupaten Cilacap	-10,28	2,15
Kabupaten Banyumas	-1,65	4,00
Kabupaten Purbalingga	-1,18	3,19
Kabupaten Banjarnegara	-1,32	3,26
Kabupaten Kebumen	-1,45	3,71
Kabupaten Purworejo	-1,61	3,38
Kabupaten Wonosobo	-1,64	3,68
Kabupaten Magelang	-1,67	3,48
Kabupaten Boyolali	-1,20	4,63
Kabupaten Klaten	-1,17	3,82
Kabupaten Sukoharjo	-1,70	3,82
Kabupaten Wonogiri	-1,41	3,35
Kabupaten Karanganyar	-1,87	3,57
Kabupaten Sragen	-1,81	3,75
Kabupaten Grobogan	-1,57	3,78
Kabupaten Blora	-4,56	3,68
Kabupaten Rembang	-1,49	3,85
Kabupaten Pati	-1,16	3,38
Kabupaten Kudus	-3,11	-1,98
Kabupaten Jepara	-1,92	4,63
Kabupaten Demak	-0,23	2,62
Kabupaten Semarang	-2,67	3,63
Kabupaten Temanggung	-2,13	3,34
Kabupaten Kendal	-1,51	3,89
Kabupaten Batang	-1,29	4,88
Kabupaten Pekalongan	-1,89	3,54
Kabupaten Pemasang	-0,61	4,19
Kabupaten Tegal	-1,48	3,72
Kabupaten Brebes	-0,47	2,33
Kota Magelang	-2,45	3,20
Kota Surakarta	-1,76	4,01
Kota Salatiga	-1,68	3,33
Kota Semarang	-1,85	5,16
Kota Pekalongan	-1,87	3,59
Kota Tegal	-2,29	3,12

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 pada tahun 2020 seiring dengan adanya *covid 19*, perekonomian tidak mengalami pertumbuhan, karena berada di angka -1,938 persen. Namun pada tahun 2021 seiring dengan meredanya bencana covid 19, pertumbuhan ekonomi kembali bangkit dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,414 persen. Namun demikian, bukan berarti bahwa kesejahteraan masyarakat sudah terpenuhi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu Kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi pengaruh yang serius terhadap pembangunan manusia karena masalah kemiskinan adalah masalah kompleks yang bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan lain seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi tidak mendapat perhatian. Keadaan tersebut menjadikan adanya kesenjangan pembangunan manusia yang pada akhirnya mengakibatkan indeks pembangunan manusia menjadi rendah (Mirza, 2012). Berdasarkan data BPS, secara umum sejak tahun 2011 - 2019 angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Sebagai contoh dapat dilihat dari tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, 2020 – 2021 (%)

Kabupaten/kota	Kemiskinan	
	2020	2021
Kabupaten Cilacap	11,46	11,67
Kabupaten Banyumas	13,26	13,66
Kabupaten Purbalingga	15,90	16,24
Kabupaten Banjarnegara	15,64	16,23
Kabupaten Kebumen	17,59	17,83
Kabupaten Purworejo	11,78	12,40
Kabupaten Wonosobo	17,36	17,67
Kabupaten Magelang	11,27	11,91
Kabupaten Boyolali	10,18	10,62
Kabupaten Klaten	12,89	13,49
Kabupaten Sukoharjo	7,68	8,23
Kabupaten Wonogiri	10,86	11,55
Kabupaten Karanganyar	10,28	10,68
Kabupaten Sragen	10,38	13,83
Kabupaten Grobogan	12,46	12,74
Kabupaten Blora	11,96	12,39
Kabupaten Rembang	15,60	15,80
Kabupaten Pati	10,08	10,21
Kabupaten Kudus	7,31	7,60
Kabupaten Jepara	7,17	7,44
Kabupaten Demak	12,54	12,92
Kabupaten Semarang	7,51	7,82
Kabupaten Temanggung	9,96	10,17
Kabupaten Kendal	9,99	10,24
Kabupaten Batang	9,13	9,68
Kabupaten Pekalongan	10,19	10,57
Kabupaten Pemalang	16,02	16,56
Kabupaten Tegal	8,14	8,60
Kabupaten Brebes	17,03	17,43
Kota Magelang	7,58	7,75
Kota Surakarta	9,03	9,40
Kota Salatiga	4,94	5,14
Kota Semarang	4,34	4,56
Kota Pekalongan	7,17	7,59
Kota Tegal	7,80	8,12

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pada tahun 2020 – 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2020 sebesar 11,01 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 11,39 persen. Peningkatan tersebut terjadi karena dampak dari *covid 19*. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Chalid dan Yusuf (2014) menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Kemiskinan mempunyai peran untuk menentukan proses pembangunan yang mengutamakan partisipasi langsung dari masyarakat. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dapat mempengaruhi pembangunan manusia, yang disebabkan karena rendahnya tingkat daya beli masyarakat miskin. Perlu dilakukan kebijakan pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan yang muncul diatas, maka penting untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari upah minimum regional, pertumbuhan produk domestik regional bruto, kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah 2011 – 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh upah minimum regional terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2011 – 2021 ?
2. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2011 – 2021?

3. Bagaimanakah pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2011 – 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas ,maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2011-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2011-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2011-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah terkait dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah.
- 2) Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan serta pengetahuan terkait pengaruh Upah Minimum Regional, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah.

- 3) Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber acuan untuk studi selanjutnya terkait dengan penelitian ini serta berguna untuk menambah pengalaman serta pengetahuan peneliti berkaitan dengan adanya pengaruh dari Upah Minimum Regional, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang didapatkan, teori, fakta dan penelitian yang sudah dilakukan maka disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga upah minimum regional berpengaruh positif terhadap Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2011 – 2021.
2. Diduga pertumbuhan produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2011- 2021.
3. Diduga kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah 2011 – 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menerangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan studi terkait..

BAB III Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari data dan sumber data, model penelitian, alat analisis dan definisi operasional.

BAB IV Hasil & Pembahasan

Bab ini menerangkan hasil penelitian yang didapatkan dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

